



LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023

**Kecamatan Kota Sumenep**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Kecamatan Kota Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kota Sumenep. Kinerja Kecamatan Kota Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Sumenep tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kota Sumenep tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas,

dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kota Sumenep pada tahun- tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Januari 2024

**CAMAT KOTA SUMENEP**

**FARUK HANAFI, S. Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770321 199602 1 001

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
- C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- D. LANDASAN HUKUM
- B. SISTEMATIKA

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMYA
- C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR  
RENSTRA
- D. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU  
PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE  
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
- E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
- F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA
- G. REALISASI ANGGARAN

#### **BAB IV : PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib untuk memperhatikan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati yang mengatur tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Bersamaan dengan disusunnya Renstra Perubahan Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ini kedudukan Kecamatan ditentukan melalui pengesahan Peraturan Daerah yang mengatur Tugas dan Fungsi sehingga untuk memastikan langkah kerja dan tugas Kecamatan maka secara normatif Tugas dari Kecamatan dapat mengakomodir Peraturan Daerah no 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2018 tentang Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

Maksud dari Pelimpahan urusan tersebut adalah :

1. Melaksanakan pelimpahan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kriteria
  - a. Proses sederhana
  - b. Objek perizinan berskala kecil
  - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks
  - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi
2. Pelayanan perizinan dimaksud dapat melalui pelayanan terpadu
3. Pelayanan non perizinan dilaksanakan dengan kriteria
  - a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan
  - b. Kegiatan berskala kecil
  - c. Pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin
4. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan pemetaan Pelayanan Publik sesuai karakteristik

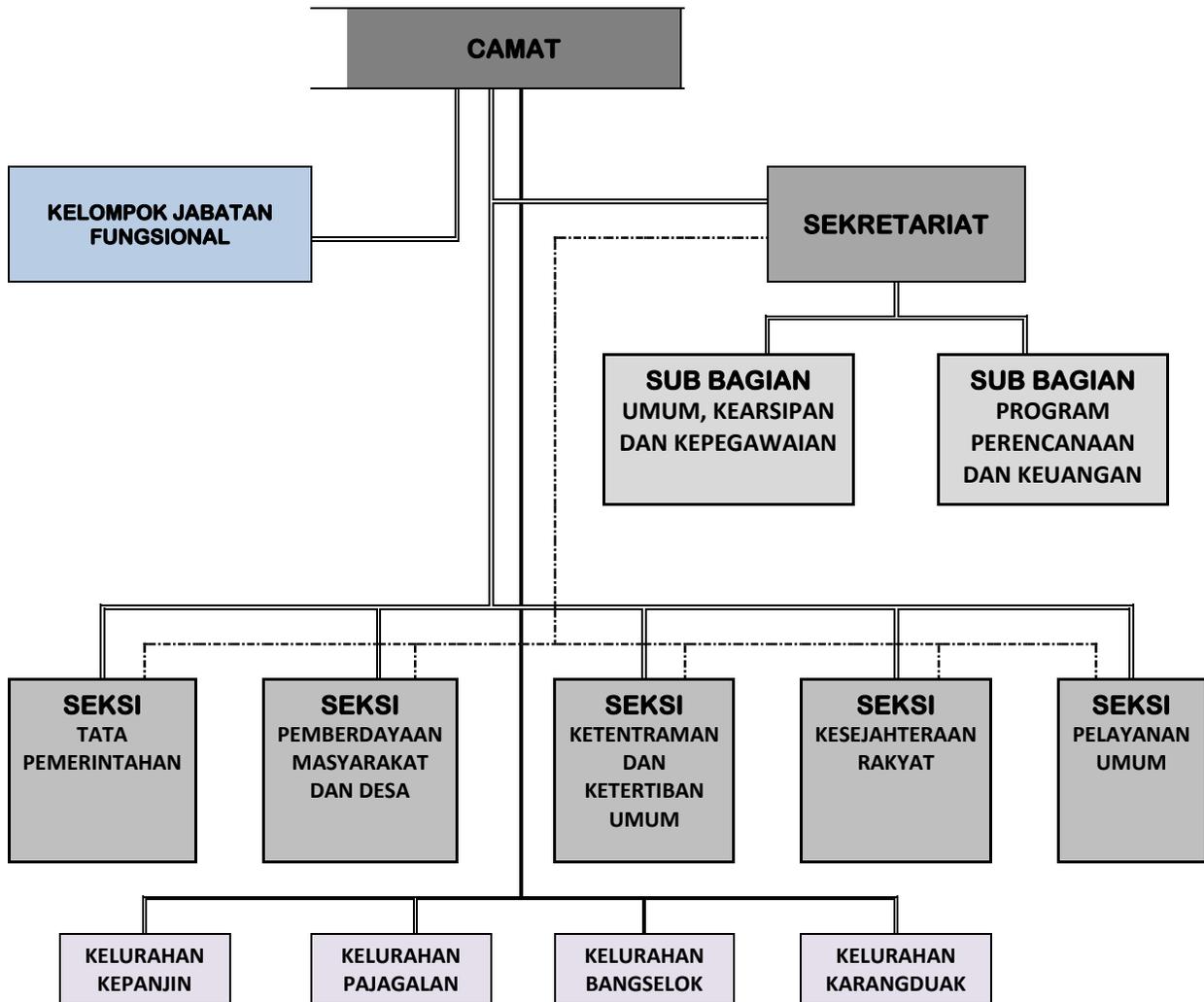
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah Struktur Organisasi Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yang berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c. 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d. 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi



### C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan terutama yang terlibat dengan masyarakat dan atau OPD baik lintas horizontal maupun vertical akan berpotensi timbulnya

permasalahan. Dari setiap masalah tersebut akan merumuskan Isu Strategis. Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Nomor	Permasalahan	Isu Strategis
1	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Lemahnya dukungan antar sektor baik horizontal OPD maupun vertikal antar desa
	Belum optimalnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat	
2	SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan	Optimalisasi Pelayanan berbasis teknologi
	Plotting SDM pelayanan publik yang kurang tepat sehingga menjadi penghambat pelayanan	

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### **E. SISTEMATIKA**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diinterfensi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**  
**Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan, inovatif	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis E- government	Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**1. Tujuan dan Sasaran Renstra**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep**

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan</b>	<b>Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kota Sumenep</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	83	85	88	89	90
Meningkatnya fasilitas dan koordinasi Desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100

## **2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kota Sumenep**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya mutu layanan publik	Nilai SKM Kecamatan	Skor	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	$SKM = NRR \text{ Tertimbang} \times 25$ $NRR \text{ Tertimbang} = NRR \text{ per Unsur} \times 0,11$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang Terasilitasi	%	<p>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan fasilitasi merupakan indikator yang menunjukkan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggara n kegiatan desa agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Jumlah Pemerintah Desa</p> $\frac{\text{Jumlah Pemerintah Desa yang diberikan fasilitasi}}{\text{Jumlah Pemerintah Desa}} \times 100$	Report Base Data di Kecamatan
---	---	-------------------------------------	---	--	--	-------------------------------

3	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja	$\frac{\text{Target Capaian Kinerja}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100$	Report Base Data di Kecamatan
---	---	---	---	--	---	-------------------------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2023

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 ([link : https://.....](https://.....)) serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja ([link : https://.....](https://.....)). Berikut Rencana Kerja Kecamatan kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kecamatan		IKM Kecamatan	%	85
		1.1 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa / Kelurahan	Rasio Jumlah Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dan dikoordinasi	%	85
		1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A
		1.3 Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah (Kecamatan Kota)	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (Kecamatan Kota)	%	100

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian kinerja tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85%
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	RALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	indeks	85	85	100%
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%

**Tabel 3.1.1****Realisasi Dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2023**

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KIERJA	RALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	indeks	85	85	100%

**B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMYA**

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (Tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3.2****Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	indeks	80	83	85
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%

**Tabel 3.2.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	indeks	80	83	85

**C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDART NASIONAL (SPM)**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ada 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu SPM :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Sosial

sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Kecamatan, Kecamatan Kota Sumenep merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dari 6 (enam) SPM yang ada dan dengan tugas Kecamatan Kota Sumenep, maka tidak ada realisasi kinerja yang dapat dibandingkan dengan target SPM yang ada, tetapi Kecamatan Kota Sumenep berkewajiban memberikan bantuan teknis berdasarkan tugas dan fungsi dalam pencapaian target nasional tersebut melalui program kerja dan

kegiatan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka percepatan pencapaian target SPM maupun target-target lainnya sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sumenep, sehingga target kinerja yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dapat dicapai dengan baik.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/  
Kabupaten Sumenep lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	80	100
2	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa dibina	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Perangkat Desa	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Pemerintahan	100%	100%	100%

	Desa				
--	------	--	--	--	--

#### D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.4**

#### Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIA N s/d TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	indeks	85	85	100%
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%

**Tabel 3.4.1**

#### Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	SATUAN	CAPAIA N s/d TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu	Nilai Survei	indeks	85	85	100%

	Layanan	Kepuasan Masyarakat (SKM)				
--	---------	---------------------------	--	--	--	--

**E. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

**Tabel 3.5**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	85	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja pelayanan umum seperti pengurusan SKCK, waris, dll	
2	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	tercapainya target pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana dan terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut	
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100%	100%	100%	tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, perangkat desa dan juga masyarakat	

4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan	
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Perangkat Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 5 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa	
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 6 karena adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa	

Uraian penjelasan tabel 3.5 :

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran 1,2, 3, 4, 5, dan 6 dipengaruhi oleh :

**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Kota Sumenep**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja pelayanan umum seperti pengelolaan SKCK, waris, dll

**Sasaran 2 : Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 2 disebabkan oleh tercapainya target pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana dan terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut

**Sasaran 3 : Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, perangkat desa dan juga masyarakat.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan.

**Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 5 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa. Selain dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa juga dipengaruhi dari tingkat koordinasi dan sosialisasi lintas sektor setiap ada permasalahan pelayanan terhadap masyarakat.

**Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 6 karena adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKM	85	85	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja pelayanan umum seperti pengurusan SKCK, waris, dll	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	tercapainya target pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana dan terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut	
3	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100%	100%	100%	tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, perangkat desa dan juga masyarakat	

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan	
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Perangkat Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 5 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 6 karena adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa	

#### **F. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6
	<b>KEWILAYAHAN</b>				
	<b>KECAMATAN KOTA SUMENEP</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.468.783.215,00	6.205.544.943,00	263.238.272,00	95,9
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.788.800,00	5.788.800,00	0,00	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.767.491.410,00	1.766.151.866,00	1.339.544,00	99,9
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.159.400,00	6.159.400,00	0,00	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	160.667.500,00	133.467.500,00	27.200.000,00	83,1
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.719.400,00	28.669.400,00	50.000,00	99,8
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.437.609.725,00</b>	<b>8.145.781.909,00</b>	<b>291.827.816,00</b>	<b>96,5</b>

Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Kinerja 2023**

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Meningkatnya Mutu Layanan</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
I.1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	1 dok.	100%
I.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok.	1 dok.	100%
I.1.3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.	1 dok.	100%
I.1.4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.	1 dok.	100%
I.1.5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 dok.	1 dok.	100%

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
I.1.6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
I.1.7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
I.1.8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	50 org.	50 org.	100%
I.1.9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56 paket	56 paket	100%
I.1.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
I.1.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	100%
I.1.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
I.1.13	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	4 paket	4 paket	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	dan Penggandaan	yang Disediakan			
I.1.14	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dok.	3 dok.	100%
I.1.15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	100%
I.1.16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
I.1.17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	100%
I.1.18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
I.1.19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 lap.	12 lap.	100%
I.1.20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap.	12 lap.	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.1.21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
I.1.22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	20 unit	20 unit	100%
I.1.23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
I.2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	12 lap.	12 lap.	100%
I.3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan	12 laporan	100%
I.3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	264 keluarga	264 keluarga	100%
I.4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	12 laporan	12 laporan	100%
I.4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>	100	100	100%
I.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 orang	30 orang	100%
I.5.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%
I.6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	100	100	100%
I.6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pemerintahan Desa				
I.6.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1 dokumen	100%
I.6.3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	12 laporan	100%
<b>KELURAHAN KEPANJIN</b>					
<b>I.1.2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9 paket	9 paket	100%
I.1.2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
I.1.2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
I.1.2.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan	12 laporan	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	dan Listrik	Disediakan			
I.1.2.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100%
I.1.2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	100%
I.1.2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
<b>I.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	4 unit	100%
I.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 pokmas	23 pokmas	100%
<b>KELURAHAN BANGSELOK</b>					
I.1.3	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.1.3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 paket	9 paket	100%
I.1.3.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100%
I.1.3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
I.1.3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
I.1.3.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
I.1.3.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
I.1.3.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.1.3.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	100%
I.1.3.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	11 unit	100%
I.1.3.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
<b>I.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	4 unit	100%
I.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 pokmas	23 pokmas	100%
<b>KELURAHAN KARANGDUAK</b>					
I.1.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada	100	100	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Masyarakat</b>			
I.1.4.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	8 paket	100%
I.1.4.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
I.1.4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
I.1.4.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100%
I.1.4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
I.1.4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100%
I.1.4.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	100%
I.1.4.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	1 unit	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			
<b>I.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	5 unit	100%
I.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 pokmas	20 pokmas	100%
<b>KELURAHAN PAJAGALAN</b>					
<b>I.1.5</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.1.5.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	15 paket	15 paket	100%
I.1.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100%
I.1.5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 paket	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.1.5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
I.1.5.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
I.1.5.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
I.1.5.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100%
I.1.5.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
I.1.5.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100%
I.1.5.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	3 jenis	3 jenis	100%
I.1.5.11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	2 unit	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			
<b>I.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
I.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	10 unit	100%
I.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 pokmas	20 pokmas	100%
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa</b>	<b>Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100%
<b>II.1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
II.1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	100%
II.1.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1 dokumen	100%
II.1.1.3	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Laporan Hasil	12 laporan	12 laporan	

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			100%
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>III.1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.1.3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.1.4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.1.5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
III.1.6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
III.1.7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
III.1.8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	50 orang	50 orang	100%
III.1.9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56 paket	56 paket	100%
III.1.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
III.1.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	100%
III.1.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
III.1.13	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.1.14	Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	100%
III.1.15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	100%
III.1.16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
III.1.17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	100%
III.1.18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
III.1.19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 laporan	12 laporan	100%
III.1.20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
III.1.21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 unit	1 unit	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
III.1.22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	20 unit	20 unit	100%
III.1.23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	196 M2	196 M2	100%
<b>III.2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	12 lap.	12 lap.	100%
<b>III.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan	12 laporan	100%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	264 keluarga	264 keluarga	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kelurahan - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
<b>III.4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	12 laporan	12 laporan	100%
III.4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100%
<b>III.5</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	30 orang	30 orang	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%
<b>III.6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	100%
III.6.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.6.3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	12 laporan	12 laporan	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa di Wilayahnya			
<b>KELURAHAN KEPANJIN</b>					
III.1.2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 paket	9 paket	100%
III.1.2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
III.1.2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
III.1.2.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
III.1.2.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100%
III.1.2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.1.2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
<b>III.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	4 unit	100%
III.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 pokmas	23 pokmas	100%
<b>KELURAHAN BANGSELOK</b>					
<b>III.1.2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 paket	9 paket	100%
III.1.2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100%
III.1.2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.1.2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
III.1.2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
III.1.2.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
III.1.2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
III.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	100%
III.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	11 unit	100%
III.1.2.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
<b>III.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	4 unit	100%
III.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 pokmas	23 pokmas	100%
<b>KELURAHAN KARANGDUAK</b>					
<b>III.1.2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	8 paket	100%
III.1.2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
III.1.2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
III.1.2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan	6 unit	6 unit	

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan			100%
III.1.2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
III.1.2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100%
III.1.2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	100%
III.1.2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
<b>III.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	5 unit	5 unit	

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Prasarana Kelurahan	Terbangun			100%
III.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 pokmas	20 pokmas	100%
<b>KELURAHAN PAJAGALAN</b>					
<b>III.1.2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	15 paket	15 paket	100%
III.1.2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100%
III.1.2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 paket	100%
III.1.2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
III.1.2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
III.1.2.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
III.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan	6 unit	6 unit	

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan			100%
III.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
III.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100%
III.1.2.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	3 jenis	3 jenis	100%
III.1.2.11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
<b>III.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
III.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	10 unit	100%
III.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	20 pokmas	20 pokmas	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

### G. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**  
**KRITERIA EFISIENSI**

Rasio Efisien	Kriteria Efisien
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Skor 85	85	100%	160.667.500	133.467.500	83%	83%
2	Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	6.648.783.215	6.205.544.943	96%	96%
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	1.767.491.410	1.766.151.866	99%	99%

4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	6.159.400	6.159.400	100%	100%
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	160.667.500	133.467.500	83%	83%
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	28.719.400	28.669.400	99%	99%

Uraian penjelasan tabel 3.10 :

1. Kinerja Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas layanan publik” Dengan indikator “SKM Kecamatan” tercapai skor 85 dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 83% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Cukup Efisien.
2. Kinerja Sasaran ke 2 “Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 96% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 96% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.
3. Kinerja Sasaran ke 3 “Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.
4. Kinerja Sasaran ke 4 “Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 100% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.
5. Kinerja Sasaran ke 5 “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 83% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 83% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Cukup Efisien.

6. Kinerja Sasaran ke 6 “pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**  
**Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	160.667.500	133.467.500	83%	83%
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	6.648.783.215	6.205.544.943	96%	96%
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	1.767.491.410	1.766.151.866	99%	99%
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	6.159.400	6.159.400	100%	100%
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	160.667.500	133.467.500	83%	83%
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	28.719.400	28.669.400	99%	99%

Uraian penjelasan tabel 3.11 :

1. Kinerja Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas layanan publik” Dengan indikator “SKM Kecamatan” tercapai skor 85 dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 83% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Cukup Efisien.
2. Kinerja Sasaran ke 2 “Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar

96% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 96% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.

3. Kinerja Sasaran ke 3 “Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.
4. Kinerja Sasaran ke 4 “Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 100% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.
5. Kinerja Sasaran ke 5 “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 83% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 83% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Cukup Efisien.
6. Kinerja Sasaran ke 6 “pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan Kurang Efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep di tahun 2023 menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan ke-1 sampai ke-2 terdiri dari masing-masing 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat baik)
- Sasaran ke-1 sampai ke-3 terdiri dari masing-masing 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat baik)
- Sasaran Program ke-1 sampai ke-3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.437.609.725,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.145.781.909,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 96,5% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,5%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran Kecamatan Kota Sumenep.
2. Sepanjang tahun 2023, Kecamatan Kota Sumenep telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik.
3. Kecamatan Kota Sumenep juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, Januari 2024

**CAMAT KOTA SUMENEP**

**FARUK HANAFLI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770321 199602 1 001